

► PENGADAAN KENDARAAN

Legislator Desak BPK Periksa Mobil Sampah

SOLO—Sejumlah legislator mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa pengadaan mobil sampah yang realisasinya tidak sesuai perencanaan.

Tri Rahayu
redaksi@solopos.co.id

Berdasar perencanaan, seharusnya mobil sampah yang difungsikan untuk tempat pembuangan sementara (TPS) mobil berupa mobil hidrolik. Namun realisasinya berbeda yakni pembelian mobil pikap dengan bak terbuka. Pun instansi yang bertanggung jawab atas pengadaan mobil sampah dinilai kalangan legislator ganjil lantaran bukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) melainkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA).

Desakan tersebut disampaikan anggota Komisi III DPRD Solo, Abdullah A.A., saat ditemui *Espos*, Jumat (14/2). Setelah melihat rencana kegiatan anggaran (RKA) di DPPKA,

Abdullah mengatakan pengadaan mobil sampah seharusnya menggunakan teknologi hidrolik bukan pikap. Dia berpendapat apabila waktunya tidak mencukupi, mestinya Pemerintah Kota (Pemkot) bisa membatalkan pengadaan tersebut.

"Kalau tak cukup waktunya, anggarannya kan bisa dikembalikan ke kas daerah dalam bentuk sisa lebih penggunaan anggaran [silpa]. Soalnya dalam RKA jelas disebut pengadaan mobil sampah sebanyak 16 unit dengan alokasi anggaran Rp200 juta per unitnya. Harusnya ketika merealisasikan rencana itu DPPKA berkoordinasi dulu dengan DKP sehingga tidak terjadi kesalahan perencanaan," tegas Abdullah yang diamini Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto.

Penggantian Bak

Abdullah mempertanyakan pikap yang kini sudah beroperasi. Ketika ada tambahan teknologi hidrolik pada pikap, Dullah pun mempertanyakan perlu tidaknya penggantian bak. Apabila baknya harus diganti, Abdullah menilai langkah tersebut merupakan pemborosan anggaran.

Dullah menambahkan apabila pemborosan anggaran terjadi maka bukan saja DPPKA dan DKP yang bertanggung jawab melainkan tim

► Keterangan pada rencana kegiatan anggaran DPPKA menyebut pembelian mobil hidrolik.

► DKP diminta menolak pikap yang tak sesuai dengan perencanaan.

anggaran pemerintah daerah (TAPD). "Di Badan Anggaran (banggar) sempat muncul dua alternatif antara hidrolik atau manual. Kalau mempertimbangkan kepentingan jangka panjang, mestinya langsung hidrolik. DKP jangan asal mengaku sebagai pengguna. Ketika diberi barang yang tidak sesuai kebutuhan seharusnya DKP bisa menolak. Yang aneh itu kan mengapa justru DKP langsung menerima dan seolah tak ada beban," ujar Abdullah.

Abdullah yang juga anggota banggar DPRD Solo mengakui pembahasan keuangan tidak merinci RKA di masing-masing instansi. Menurut dia, pembahasan di banggar bersifat global dan penuh dengan muatan kepentingan serta ego *counterpart*. "Persoalan ini akan menjadi catatan kami di banggar, agar ke depan lebih jeli dalam menyoroti anggaran," kata dia.